BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera telah terpenuhi dari unsur setiap orang, unsur menggunakan B3, menghasilkan dan mengelola limbah B3, serta unsur bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Akan tetapi, unsur menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup tidak terpenuhi secara menyeluruh di mana KLHK tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terkait dengan berdampak luas dan seluas mana dampak lingkungan hidup yang tercemar dan rusak akibat kegiatan dan usaha PT Soedali Sejahtera. Ancaman serius tidak dapat diinterpretasikan secara luas dan umum, diperlukan batasan dan ketentuan terkait dengan ancaman serius yang lebih mendasar dan spesifik terkait menentukan seberapa luasnya dampak yang ditimbulkan dan tingkat keresahan yang dialami oleh masyarakat.
2. Penentuan besaran ganti rugi lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan Permen LH 7/2014. Akan

tetapi, terdapat kekosongan hukum dalam Permen LH 7/2014 tersebut yang tidak mengatur perhitungan ganti kerugian yang disebabkan oleh logam berat dan sedimen sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas penegakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pelaku pencemaran lingkungan karena parameter yang digunakan tidak diatur secara eksplisit dalam baku mutu air yang berlaku untuk kelas air terkait. Ketidaksiuaian ini juga berdampak pada legitimasi nilai ganti kerugian yang ditetapkan. Perhitungan ganti kerugian harus akurat dan transparan agar dapat menjadi tolak ukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penyempurnaan terhadap kerangka hukum yang melandasi diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) di Indonesia berupa harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kedudukan hukum pengajuan gugatan ganti rugi lingkungan hidup oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh KLHK untuk mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan secara adil dan efektif. Selain itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) karena saat

ini masih diatur secara umum dan belum memiliki pengaturan teknis yang spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

2. Diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan perhitungan ganti rugi lingkungan hidup yang disebabkan oleh logam berat dan sedimen sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan memaksimalkan penegakan pemulihan lingkungan hidup hal ini karena Permen LH 7/2014 sebagai dasar perhitungan ganti kerugian lingkungan hidup di Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait perhitungan pencemaran akibat logam berat dan sedimen. Perhitungan ganti kerugian yang tidak didasarkan pada standar yang jelas menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan besaran kerugian ekologis dan biaya pemulihan yang harus ditanggung pelaku usaha.